

BAB V

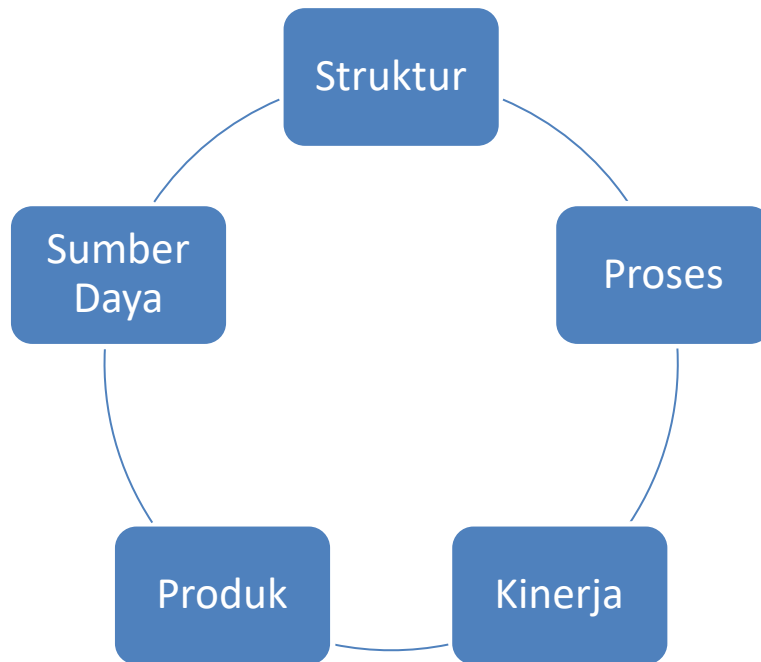
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA MAKASSAR

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kota Makassar.

Di dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Perangkat daerah (OPD) harus mampu merumuskan nilai yang akan dianut bersama dalam upaya pencapaian sasaran dimaksud. Nilai Perangkat Daerah harus mampu menggambarkan tata nilai dan falsafah organisasi yang dianut bersama dalam melaksanakan tugas-tugasnya yang tentunya akan berkaitan erat dengan mutu pelayanan Perangkat Daerah. Oleh karena itu diperlukan sebuah strategi dalam mencapai tujuan tersebut. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan Program-program untuk mewujudkan Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota yang sudah ditentukan. Strategi yang akan sudah ditentukan selanjutnya diuraikan dalam berbagai kebijakan, yang masing-masing kebijakan akan diuraikan menjadi sebuah program-program.

Strategi dan kebijakan dalam rencana strategis PD merupakan strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana Program Prioritas dalam rancangan awal RPJMD tahun 2021—2026 dan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat Daerah.

Pengelolaan strategi dan arah kebijakan atas Koperasi dan UKM dilakukan melalui aspek-aspek Struktur, Proses, Produk, Sumber Daya dan Kinerja. Kelima unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang saling menunjang dan memiliki fungsi masing-masing seperti yang terlihat di gambar 5.1 berikut ini



1. Pendekatan Struktur

Pada pendekatan struktur, manajemen pengelolaan Koperasi dan UKM dilakukan melalui penguatan Dinas Koperasi dan UKM yang berdaya guna. Pemantapan kewenangan instansional terkait sesuai dengan kebutuhan terhadap pengelolaan Koperasi dan UKM. Pengelolaan Koperasi dan UKM melibatkan lintas sektor sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Identifikasi tugas dan fungsi perlu dilakukan guna memperoleh gambaran untuk memperoleh titik simpul koordinasi antar instansi sehingga diharapkan mampu mengoptimalkan kewenangan masing-masing instansi.

Dalam menjalankan perannya, keberadaan Dinas Koperasi dan UKM memiliki hubungan tali temali yang kuat dalam pengelolaan Koperasi dan UKM. Oleh karena itu, Dinas Koperasi dan UKM harus memperkuat institusi yang solid, dengan dasar pertimbangan:

- Efektifitas Pengelolaan. Dalam kaitan dengan pengelolaan, Dinas Koperasi dan UKM berperan sebagai institusi yang memfasilitasi pelaku-pelaku usaha agar mampu berdaya saing, baik pada pasar lokal, regional bahkan internasional.
- Soliditas Pengelolaan. Dinas Koperasi dan UKM mampu mengelola kegiatan pelaku usaha melalui sinergitas dan soliditas pengelolaan dengan para stakeholders lainnya. Termasuk di dalamnya kemampuan melakukan koordinasi antar stakeholders secara baik, terarah dan terukur.

- Komunikasi. Dalam rangka pengelolaan, maka dibutuhkan komunikasi yang intens antara pelaku usaha dengan Dinas Koperasi dan UKM terutama terkait kegiatan bisnis.
- Pertanggungjawaban. Setiap program yang dilaksanakan dilakukan dengan pertanggung jawaban yang profesional dan transparan.

Dalam pemantapan struktur organisasi yang berdaya guna, maka perlu ditetapkan peran kelembagaan sebagai berikut:

1. Peran Pengambilan Keputusan, memberikan arah dan pedoman dalam pengambilan keputusan terhadap pengelolaan Koperasi dan UKM sebagai bagian dari perencanaan pembangunan.
2. Peran Teknis Substansi, baik berkaitan dengan pendekatan sosiologis maupun pendekatan ekonomi dan hukum (mencakup pengawasan dan penertiban atas kegiatan yang melanggar Perda (non yustisi).
3. Peran Monitoring, mencakup penentuan indikator dan monitoring serta evaluasi atas kegiatan pengelolaan.
4. Peran Partisipasi Masyarakat, mencakup strategi pelibatan masyarakat dalam pengelolaan Koperasi dan UKM.
5. Peran Penyediaan Data, Informasi dan Penelitian, mencakup kegiatan pengumpulan data dan informasi, penyediaan data bagi kegiatan analisis dan formulasi kebijakan dalam konteks pengelolaan Koperasi dan UKM.
6. Peran Kerjasama dan Koordinasi Kelembagaan, mencakup penguatan kerjasama dengan berbagai stakeholder terkait.

2. Pendekatan Proses

Pada tataran proses hal-hal yang harus ditetapkan antara lain:

- a. Penyiapan data/informasi dasar, antara lain berisi tentang kependudukan, jumlah koperasi dan UKM, data ekspor-impor, dan lainlain. Data dan informasi yang akurat menjadi dasar dalam penyusunan program pengelolaan Koperasi dan UKM sehingga benar-benar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Ketersediaan dan pengolahan data yang memuat seluruh data dan informasi tentang kondisi koperasi dan UKM setempat, baik yang bersifat umum, khusus, teknis, non teknis, confidential maupun non-confidential akan meningkatkan kemampuan fungsi-fungsi pengendalian sistem pengelolaan Koperasi dan UKM. Melalui pendekatan proses akan terbangun fungsi-fungsi, yaitu:
 - Fungsi Perencanaan.
 - Fungsi Pembinaan.

- Fungsi Fasilitasi.
- Fungsi Pengawasan.
- Fungsi Penegakan Hukum.

Ketersediaan dan pengelolaan data dan informasi tentang kondisi koperasi dan UKM ini perlu senantiasa diperbaharui dan dilengkapi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat secara literatif dan berkelanjutan. Dengan demikian terbangun:

- Eksistensi Informasi (Adanya data).
 - Aktualitas Informasi (Up to date data).
 - Validitas Informasi.
 - Kredibilitas Informasi.
 - Reliabilitas Informasi (Kebenaran).
 - Aksestabilitas Informasi (dapat diakses).
- b. Peraturan Pendukung/Juklak. Setiap kebijakan yang ditetapkan sebaiknya dilengkapi oleh petunjuk pelaksanaan agar dapat menghindari kesalahan penafsiran atas kebijakan tersebut.
- c. Identifikasi Persoalan/Kegiatan. Pemetaan dan inventarisasi kasus dan pendeteksian kebutuhan di bidang pengelolaan Koperasi dan UKM.
- d. Koordinasi Kegiatan. Hubungan kerjasama antara instansi terkait dalam penyusunan program.
- e. Sistem Analisa Pendukung. Ketersediaan dukungan sistem analisa maupun perangkat pendukung seperti Teknologi Informasi (TI).

3. Pendekatan Produk

Pada tataran produk, hal-hal yang harus ditetapkan antara lain:

- Prosedur penanganan aspek-aspek pengelolaan Koperasi dan UKM.
- Sistem pelaporan yang memuat kegiatan pengelolaan Koperasi dan UKM.
- Pelaksanaan kegiatan atau program.
- Berita acara.
- Matriks kinerja dan penilaian.
- Sarana dan prasarana pendukung.
- Alokasi sumber daya.
- Pendanaan, dan lain-lain.

4. Pendekatan Sumberdaya

Pengembangan Sumber daya Manusia berbasis Kompetensi di Dinas Koperasi dan UKM dilatarbelakangi oleh beberapa hal :

- a. Keberadaan Dinas Koperasi dan UKM memiliki peran strategis sebagai instrumen daerah dalam mengelola kegiatan usaha Koperasi dan UKM sehingga perlu diberdayakan dan dioptimalkan agar sesuai yang diharapkan.
- b. Pengelolaan Koperasi dan UKM yang berdaya guna memerlukan dukungan kinerja aparat/personil agar mampu menghasilkan kinerja pelayanan publik prima. Kinerja pelayanan publik prima salah satunya dimungkinkan oleh pengembangan sumberdaya manusia berbasis kompetensi.
- c. Adanya tuntutan pelayanan publik yang semakin luas, berbagai persaingan, friksi atau konflik ekonomi terhadap berbagai kepentingan yang ada membutuhkan kemampuan strategi yang adaptif terhadap situasi yang ada melalui kebijakan yang pro bisnis.

Kompetensi organisasi dan kompetensi sumberdaya manusia di dalam organisasi/gugus tugas dipandang sangat menentukan tinggi-rendahnya kinerja suatu organisasi. Oleh sebab itu upaya-upaya pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi telah dianggap sebagai rangkaian tindakan yang paling tepat untuk meningkatkan kinerja dan pencapaian tujuan suatu organisasi/gugus tugas tertentu. Beberapa aspek yang menjadi landasan konseptual dalam pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi yang perlu diperhatikan antara lain:

- o Kompetensi Sumber Daya Manusia merujuk pada penguasaan keterampilan (skill) dan pengetahuan (knowledge) serta dimilikinya integritas oleh seseorang yang kemudian tercermin melalui perilaku kinerja (job behavior) yang dapat diamati, diukur dan dievaluasi.
- o Kompetensi dibedakan menjadi dua tipe atau jenis, yakni soft competency dan hard competency. Soft competency berkaitan erat dengan kemampuan untuk mengelola proses pekerjaan, hubungan antar manusia serta membangun interaksi yang baik dengan berbagai pihak. Sedangkan tipe kompetensi yang kedua yaitu hard competency yang merupakan jenis kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan fungsional atau teknis didalam menangani suatu pekerjaan tertentu.
- o Pada hakikatnya, kompetensi dapat ditingkatkan. Upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia berbasis kompetensi atau Competency-Based Human Resources Management dapat dilakukan dengan serangkaian langkah terintegrasi.

- o Pengembangan SDM berbasis kompetensi yang handal mencakup pengembangan fungsi rekrutmen, pembinaan karir, format dan rancangan pelatihan, hingga sistem remunerasi

5. Pendekatan Kinerja Pada tataran kinerja, memuat antara lain:

- a. Tingkatan substansi Pengelolaan Koperasi dan UKM: kejelasan program, cakupan kegiatan, rencana anggaran, kapasitas aparat dan lain-lain.
- b. Tingkatan fungsi, ketepatan waktu, ketepatan penanganan kasus, ketepatan hasil dan ketepatan manfaat.
- c. Keberhasilan koordinasi. Keseluruhan kerangka sistem di atas harus dijamin bahwa semua instansi terkait maupun pihak yang berkepentingan menyepakati dan menjamin keberlangsungan sistem dilandasi pedoman kerangka kerja yang ditetapkan.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah kebijakan dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

TABEL T-C.26
Strategi, Dan Kebijakan Perangkat Daerah

VISI : Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia yang Somboredan Smart City dengan Munitas Kuat untuk Semua			
MISI 1 : Revolusi Sumber Daya Manusia (SDM) dan percepatan reformasi birokrasi menuju SDM Kota yang unggul dengan pelayanan public kelas dunia bersih dari indikasi korupsi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum
Meningkatkan Kualitas SDM Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	1. Meningkatnya Usaha Mikro menjadi wirausaha	Penyediaan sarana dan prasarana usaha bagi Koperasi dan UMKM	Penciptaan iklim investasi yang kondusif, diantaranya adalah penyediaan sistem informasi yang memadai, peningkatan fasilitas kegiatan ekonomi masyarakat dan pelayanan dunia usaha berbasis Teknologi Informasi
MISI 2 : Rekonstruksi Kesehatan, ekonomi, social dan budaya masyarakat sejahtera dengan munitas ekonomi, social, budaya dan kesehatan kota yang kuat untuk semua			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum
Mewujudkan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang berkualitas dan berdaya s dalam rangka meningkatkan perekonomian kota Makassar	1. Meningkatnya jumlah unit usaha yang berdaya saing	Peningkatan Produktivitas/omset, meningkatkan kemampuan pemasaran Produk Unggulan Koperasi dan UMKM	- Peningkatan fasilitasi standarisasi produk UMKM DAN Koperasi - Meningkatnya jaringan kerjasama UMKM dan informasi bisnis serta pengembangan pemasaran

		Peningkatan usaha ekonomi produktif	- Peningkatan potensi dan sumberdaya ekonomi,memperkuat budaya kewirausahaan serta pengembangan akses pasar
--	--	-------------------------------------	---